



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.745, 2016

BKPM. Tunjangan Kinerja. Jabatan. Kelas
Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

- 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan

organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
6. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
7. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat, dilantik, dan telah melaksanakan tugas dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. **Pejabat Fungsional Tertentu** adalah Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diangkat dan ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan tidak sedang dibebaskan baik bersifat sementara maupun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Pejabat yang Berwenang** adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan/atau memberhentikan Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
10. **Eselon** adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) **Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.**
- (2) **Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. **Jabatan Struktural;**
 - b. **Jabatan Fungsional Tertentu;**
 - c. **Jabatan Fungsional Umum.**
- (3) **Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kelas Jabatan.**
- (4) **Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam:**
 - a. **Lampiran I untuk Jabatan dan Kelas Jabatan Struktural;**
 - b. **Lampiran II untuk Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Tertentu;**
 - c. **Lampiran III untuk Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Umum,**
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

- (1) Jabatan untuk masing-masing Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu didasarkan pada:
 - a. keputusan tentang pengangkatan dalam dan/atau alih tugas dari Jabatan Struktural;
 - b. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu; atau
 - c. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Tertentu,yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum didasarkan pada keputusan tentang penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 4

- (1) Keputusan penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Petikan keputusan penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal diotentikasi oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 5

- (1) Setiap alih tugas Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum harus ditetapkan dengan keputusan penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

- (2) Dalam hal alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang menetapkan keputusan penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan adalah Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB III TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Kepada Pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
- a. Lampiran I untuk Tunjangan Kinerja Jabatan Struktural;
 - b. Lampiran II untuk Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Tertentu;
 - c. Lampiran III untuk Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Umum,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 8

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Kepala.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1198) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 701), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2016

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA
 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TUNJANGAN KINERJA JABATAN STRUKTURAL

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|-----|---|--------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kepala BKPM | | | 32,805,000 |
| 2. | Wakil Kepala BKPM | I.a | | 29,805,000 |
| 3. | Sekretaris Utama | I.a | 17 | 26,324,000 |
| 4. | Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 5. | Kepala Bagian Penyusunan Program | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 6. | Kepala Sub Bagian Perencanaan Program | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 7. | Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 8. | Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 9. | Kepala Sub Bagian Evaluasi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 10. | Kepala Sub Bagian Pelaporan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 11. | Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan TU Pimpinan | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 12. | Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 13. | Kepala Sub Bagian Peraturan Penanaman Modal | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 14. | Kepala Sub Bagian Peraturan Lainnya | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 15. | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Peraturan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 16. | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 17. | Kepala Sub Bagian Hubungan Kelembagaan | IV.a | 9 | 3,781,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|-----|---|--------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Kepala Sub Bagian Peliputan dan Hubungan Media Masa | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 19. | Kepala Bagian Protokol dan TU Pimpinan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 20. | Kepala Sub Bagian Protokol | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 21. | Kepala Sub Bagian TU Pimpinan | IV.a | 8 | 3,319,000 |
| 22. | Kepala Biro Umum | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 23. | Kepala Bagian Tata Usaha | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 24. | Kepala Sub Bagian Persuratan dan Dokumen | IV.a | 8 | 3,319,000 |
| 25. | Kepala Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 26. | Kepala Bagian Kepegawaian | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 27. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 28. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 29. | Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 30. | Kepala Bagian Keuangan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 31. | Kepala Sub Bagian Perbendaharaan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 32. | Kepala Sub Bagian Gaji | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 33. | Kepala Sub Bagian Verifikasi | IV.a | 8 | 3,319,000 |
| 34. | Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 35. | Kepala Sub Bagian Perlengkapan | IV.a | 8 | 3,319,000 |
| 36. | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga | IV.a | 8 | 3,319,000 |
| 37. | Kepala Sub Bagian Keamanan | IV.a | 8 | 3,319,000 |
| 38. | Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | I.a | 17 | 26,324,000 |
| 39. | Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 40. | Kepala Sub Direktorat Agribisnis | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 41. | Kepala Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 42. | Kepala Seksi Kelautan, Perikanan dan Peternakan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 43. | Kepala Sub Direktorat Energi | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 44. | Kepala Seksi Energi Terbarukan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 45. | Kepala Seksi Energi Tak Terbarukan | IV.a | 9 | 3,781,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------------|--|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46. | Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Mineral | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 47. | Kepala Seksi Mineral Logam | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 48. | Kepala Seksi Mineral Non Logam | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 49. | Direktur Perencanaan Industri Manufaktur | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 50. | Kepala Sub Direktorat Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 51. | Kepala Seksi Industri Logam dan Mesin | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 52. | Kepala Seksi Industri Tekstil dan Aneka | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 53. | Kepala Sub Direktorat Industri Kimia | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 54. | Kepala Seksi Industri Kimia Dasar | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 55. | Kepala Seksi Industri Barang Kimia dan Farmasi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 56. | Kepala Sub Direktorat Industri Alat Transportasi dan Telematika | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 57. | Kepala Seksi Industri Alat Transportasi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 58. | Kepala Seksi Industri Telematika | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 59. | Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 60. | Kepala Sub Direktorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 61. | Kepala Seksi Jasa Perdagangan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 62. | Kepala Seksi Jasa Pariwisata | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 63. | Kepala Sub Direktorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Lainnya | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 64. | Kepala Seksi Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 65. | Kepala Seksi Jasa Lainnya | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 66. | Kepala Sub Direktorat Kawasan Ekonomi | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 67. | Kepala Seksi Kawasan Ekonomi Khusus | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 68. | Kepala Seksi Kawasan Ekonomi Lainnya | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 69. | Direktur Perencanaan Infrastruktur | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 70. | Kepala Sub Direktorat Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 71. | Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian | IV.a | 9 | 3,781,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------------|--|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72. | Kepala Seksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 73. | Kepala Sub Direktorat Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 74. | Kepala Seksi Infrastruktur Energi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 75. | Kepala Seksi Infrastruktur Sumber Daya Air | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 76. | Kepala Sub Direktorat Infrastruktur Transportasi Laut, Udara dan Infrastruktur Lainnya | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 77. | Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi Laut | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 78. | Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| | | | | |
| 79. | Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal | I.a | 17 | 26,324,000 |
| 80. | Direktur Deregulasi Penanaman Modal | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 81. | Kepala Sub Direktorat Sektor Primer | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 82. | Kepala Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 83. | Kepala Seksi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 84. | Kepala Sub Direktorat Sektor Sekunder | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 85. | Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 86. | Kepala Seksi Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 87. | Kepala Sub Direktorat Sektor Tersier | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 88. | Kepala Seksi Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 89. | Kepala Seksi Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 90. | Direktur Pengembangan Potensi Daerah | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 91. | Kepala Sub Direktorat Sektor Primer dan Tersier | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 92. | Kepala Seksi Sektor Primer | IV.a | 9 | 3,781,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------|---|--------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 93. | Kepala Seksi Sektor Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 94. | Kepala Sub Direktorat Sektor Sekunder | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 95. | Kepala Seksi Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 96. | Kepala Seksi Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 97. | Direktur Pemberdayaan Usaha | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 98. | Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penyuluhan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 99. | Kepala Seksi Pembinaan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 100. | Kepala Seksi Penyuluhan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 101. | Kepala Sub Direktorat Kemitraan Usaha | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 102. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 103. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 104. | Kepala Sub Direktorat Pelayanan Usaha | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 105. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 106. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 107. | Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal | I.a | 17 | 26,324,000 |
| 108. | Direktur Pengembangan Promosi | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 109. | Kepala Sub Direktorat Analisis Strategi Promosi | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 110. | Kepala Seksi Analisis Target Promosi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 111. | Kepala Seksi Analisis Daya Saing Promosi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 112. | Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Promosi Luar Negeri | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 113. | Kepala Seksi Wilayah Amerika dan Eropa | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 114. | Kepala Seksi Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 115. | Direktur Promosi Sektoral | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 116. | Kepala Sub Direktorat Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 117. | Kepala Seksi Industri Sumber Daya Alam | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 118. | Kepala Seksi Jasa dan Kawasan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 119. | Kepala Sub Direktorat Promosi Industri Manufaktur | III.a | 12 | 7,271,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------|---|--------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 120. | Kepala Seksi Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronika | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 121. | Kepala Seksi Industri Manufaktur Lainnya | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 122. | Kepala Sub Direktorat Promosi Infrastruktur | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 123. | Kepala Seksi Infrastruktur Transportasi, Jalan dan Jembatan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 124. | Kepala Seksi Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air dan Infrastruktur Lainnya | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 125. | Direktur Fasilitasi Promosi Daerah | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 126. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Sumatera dan Kalimantan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 127. | Kepala Seksi Wilayah Sumatera | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 128. | Kepala Seksi Wilayah Kalimantan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 129. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Jawa dan Bali | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 130. | Kepala Seksi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat dan Banten | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 131. | Kepala Seksi Wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 132. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 133. | Kepala Seksi Wilayah Sulawesi dan Maluku | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 134. | Kepala Seksi Wilayah Nusa Tenggara dan Papua | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 135. | Direktur Pameran dan Sarana Promosi | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 136. | Kepala Sub Direktorat Pameran | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 137. | Kepala Seksi Penyusunan Program dan Monitoring | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 138. | Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 139. | Kepala Sub Direktorat Media Cetak | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 140. | Kepala Seksi Materi Promosi | IV.a | 9 | 3,781,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------|--|--------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 141. | Kepala Seksi Publikasi dan Distribusi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 142. | Kepala Sub Direktorat Media Elektronik | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 143. | Kepala Seksi Materi Promosi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 144. | Kepala Seksi Pelayanan Informasi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 145. | Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal | I.a | 17 | 26,324,000 |
| 146. | Direktur Kerjasama Bilateral dan Multilateral | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 147. | Kepala Sub Direktorat Kerjasama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 148. | Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Amerika | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 149. | Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Eropa | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 150. | Kepala Sub Direktorat Kerjasama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 151. | Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Asia | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 152. | Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Pasifik dan Afrika | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 153. | Kepala Sub Direktorat Kerjasama Multilateral | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 154. | Kepala Seksi Kerjasama Organisasi PBB | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 155. | Kepala Seksi Kerjasama Organisasi Non PBB | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 156. | Direktur Kerjasama Regional | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 157. | Kepala Sub Direktorat Kerjasama Regional ASEAN | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 158. | Kepala Seksi Kerjasama ASEAN | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 159. | Kepala Seksi Kerjasama ASEAN-Negara Mitra | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 160. | Kepala Sub Direktorat Kerjasama Sub Regional ASEAN | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 161. | Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Barat Indonesia | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 162. | Kepala Seksi Kerjasama Wilayah Timur Indonesia | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 163. | Kepala Sub Direktorat Kerjasama Intra Kawasan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 164. | Kepala Seksi Kerjasama APEC | IV.a | 9 | 3,781,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------|--|--------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 165. | Kepala Seksi Kerjasama ASEM dan Kawasan Lainnya | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 166. | Direktur Kerjasama Dunia Usaha Internasional | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 167. | Kepala Sub Direktorat Asosiasi dan Lembaga Bisnis | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 168. | Kepala Seksi Asosiasi Bisnis | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 169. | Kepala Seksi Lembaga Bisnis | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 170. | Kepala Sub Direktorat Lembaga Keuangan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 171. | Kepala Seksi Lembaga Perbankan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 172. | Kepala Seksi Lembaga Non Perbankan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| | | | | |
| 173. | Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal | I.a | 17 | 26,324,000 |
| 174. | Direktur Pelayanan Aplikasi | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 175. | Kepala Sub Direktorat Aplikasi Sektor Primer dan Tersier | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 176. | Kepala Seksi Aplikasi Baru | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 177. | Kepala Seksi Aplikasi Perluasan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 178. | Kepala Seksi Aplikasi Perubahan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 179. | Kepala Sub Direktorat Aplikasi Sektor Sekunder | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 180. | Kepala Seksi Aplikasi Baru | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 181. | Kepala Seksi Aplikasi Perluasan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 182. | Kepala Seksi Aplikasi Perubahan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 183. | Direktur Pelayanan Perizinan | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 184. | Kepala Sub Direktorat Perizinan Sektor Primer dan Tersier | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 185. | Kepala Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 186. | Kepala Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 187. | Kepala Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 188. | Kepala Sub Direktorat Perizinan Sektor Sekunder | III.a | 12 | 7,271,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------|---|--------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 189. | Kepala Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 190. | Kepala Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 191. | Kepala Seksi Industri Aneka | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 192. | Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 193. | Kepala Sub Direktorat Fasilitas Sektor Primer dan Tersier | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 194. | Kepala Seksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 195. | Kepala Seksi Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 196. | Kepala Seksi Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Aneka Jasa | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 197. | Kepala Sub Direktorat Fasilitas Sektor Sekunder | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 198. | Kepala Seksi Industri Mesin, Logam dan Barang Logam | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 199. | Kepala Seksi Industri Kimia dan Barang Kimia | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 200. | Kepala Seksi Industri Aneka | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 201. | Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | I.a | 17 | 26,324,000 |
| 202. | Direktur Wilayah I | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 203. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 204. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 205. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 206. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Jambi | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 207. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 208. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 209. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 210. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------|--|--------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 211. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 212. | Direktur Wilayah II | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 213. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 214. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 215. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 216. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 217. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 218. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 219. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 220. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 221. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 222. | Direktur Wilayah III | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 223. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Jawa Barat | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 224. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 225. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 226. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Banten dan Jawa Tengah | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 227. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 228. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 229. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Seluruh Sulawesi | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 230. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 231. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 232. | Direktur Wilayah IV | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 233. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Jawa Timur | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 234. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 235. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 236. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 237. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 238. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------|--|--------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 239. | Kepala Sub Direktorat Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 240. | Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 241. | Kepala Seksi Sektor Sekunder | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 242. | Inspektur | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 243. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | IV.a | 8 | 3,319,000 |
| 244. | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 245. | Kepala Bidang Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 246. | Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 247. | Kepala Sub Bidang Penyusunan Program dan Kurikulum | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 248. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | IV.a | 8 | 3,319,000 |
| 249. | Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 250. | Kepala Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 251. | Kepala Sub Bidang Diklat Teknis | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 252. | Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 253. | Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 254. | Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 255. | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sub Sistem Pelayanan Perizinan | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 256. | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sub Sistem Pelayanan Informasi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 257. | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 258. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | IV.a | 8 | 3,319,000 |
| 259. | Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 260. | Kepala Sub Bidang Data Rencana | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 261. | Kepala Sub Bidang Data Realisasi | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 262. | Kepala Sub Bidang Pelaporan dan | IV.a | 9 | 3,781,000 |

| No. | Nama Jabatan | Eselon | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------|--|--------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penyajian Informasi | | | |
| 263. | Kepala Pusat Bantuan Hukum | II.a | 15 | 14,721,000 |
| 264. | Kepala Bidang Pelayanan Hukum | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 265. | Kepala Sub Bidang Pidana dan Tata Negara | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 266. | Kepala Sub Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 267. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | IV.a | 8 | 3,319,000 |
| 268. | Kepala Bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa | III.a | 12 | 7,271,000 |
| 269. | Kepala Sub Bidang Arbitrase | IV.a | 9 | 3,781,000 |
| 270. | Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa | IV.a | 9 | 3,781,000 |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA
 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

| No. | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pustakawan Pertama | 8 | 3,319,000 |
| 2 | Arsiparis Pertama | 8 | 3,319,000 |
| 3 | Analisis Kepegawaian Muda | 9 | 3,781,000 |
| 4 | Perancang Peraturan Perundang-undangan | 9 | 3,781,000 |
| 5 | Perencana Muda | 9 | 3,781,000 |
| 6 | Perancang Perundangan Muda | 9 | 3,781,000 |
| 7 | Perancang Peraturan Perundangan | 9 | 3,781,000 |
| 8 | Pranata Komputer | 9 | 3,781,000 |
| 9 | Perancang Perundang-undangan | 9 | 3,781,000 |
| 10 | Penilai Kelayakan Investasi | 9 | 3,781,000 |
| 11 | Penilai Kelayakan Perizinan | 9 | 3,781,000 |
| 12 | Statistisi Muda | 9 | 3,781,000 |
| 13 | Auditor Penyelia | 8 | 3,319,000 |
| 14 | Auditor Pertama | 8 | 3,319,000 |
| 15 | Auditor Muda | 9 | 3,781,000 |
| 16 | Widyaiswara Utama | 13 | 8,562,000 |
| 17 | Widyaiswara Madya | 11 | 5,183,000 |
| 18 | Widyaiswara Muda | 9 | 3,781,000 |
| 19 | Pranata Komputer Muda | 9 | 3,781,000 |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

| No. | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|-----|---|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Analisis Rencana Program dan Anggaran | 7 | 2,928,000 |
| 2 | Pengadministrasi Rencana Program dan Anggaran | 6 | 2,702,000 |
| 3 | Analisis Laporan Rencana Program dan Anggaran | 7 | 2,928,000 |
| 4 | Analisis Peraturan Perundang-undangan | 7 | 2,928,000 |
| 5 | Pranata Humas | 7 | 2,928,000 |
| 6 | Protokol | 7 | 2,928,000 |
| 7 | Penata Administrasi | 6 | 2,702,000 |
| 8 | Pengadministrasi Umum | 4 | 2,350,000 |
| 9 | Pramu Peggandaan | 3 | 2,216,000 |
| 10 | Pengadministrasi Surat dan Dokumen | 4 | 2,350,000 |
| 11 | Caraka | 3 | 2,216,000 |
| 12 | Pengadministrasi Perencanaan Pegawai | 4 | 2,350,000 |
| 13 | Analisis Perencanaan dan Mutasi Pegawai | 7 | 2,928,000 |
| 14 | Pengadministrasi Mutasi Pegawai | 4 | 2,350,000 |
| 15 | Analisis Database | 7 | 2,928,000 |
| 16 | Pengadministrasi Pembinaan Pegawai | 4 | 2,350,000 |
| 17 | Analisis Jabatan Fungsional | 7 | 2,928,000 |
| 18 | Analisis Data Anggaran & Pembukuan | 7 | 2,928,000 |
| 19 | Bendahara Rutin | 7 | 2,928,000 |
| 20 | Bendahara Gaji dan TK | 8 | 3,319,000 |
| 21 | Pembuat Daftar Gaji dan TK | 5 | 2,493,000 |
| 22 | Verifikator Keuangan | 6 | 2,702,000 |
| 23 | Pengemudi | 3 | 2,216,000 |

| No. | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Montir | 3 | 2,216,000 |
| 25 | Teknisi | 4 | 2,350,000 |
| 26 | Pengatur Angkutan | 4 | 2,350,000 |
| 27 | Pramu Tamu | 3 | 2,216,000 |
| 28 | Pramu Telpon | 4 | 2,350,000 |
| 29 | Pengadministrasi Barang Inventaris | 6 | 2,702,000 |
| 30 | Pengadministrasi Barang Habis Pakai | 6 | 2,702,000 |
| 31 | Tenaga Kesehatan | 6 | 2,702,000 |
| 32 | Satpam | 4 | 2,350,000 |
| 33 | Perencana dan Pengkaji Sektor | 7 | 2,928,000 |
| 34 | Pengadministrasi Data Rencana Penanaman Modal | 6 | 2,702,000 |
| 35 | Pengadministrasi | 4 | 2,350,000 |
| 36 | Analisis Data Kebijakan Bidang Usaha dan Sistem Insentif | 7 | 2,928,000 |
| 37 | Analisis Data dan Kebijakan Administrasi Penanaman Modal | 7 | 2,928,000 |
| 38 | Analisis Pengembangan Potensi Daerah | 7 | 2,928,000 |
| 39 | Pengelola Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah | 7 | 2,928,000 |
| 40 | Pendata Pengembangan Potensi Daerah | 5 | 2,493,000 |
| 41 | Analisis Upaya Peningkatan Pemberdayaan Usaha Nasional | 7 | 2,928,000 |
| 42 | Pengevaluasi Kegiatan Kemitraan Usaha | 7 | 2,928,000 |
| 43 | Analisis Asosiasi Dunia Usaha | 7 | 2,928,000 |
| 44 | Analisis Strategi Promosi | 7 | 2,928,000 |
| 45 | Analisis Fasilitasi Promosi Luar Negeri | 7 | 2,928,000 |
| 46 | Pengadministrasi Data Pengembangan Promosi | 6 | 2,702,000 |
| 47 | Analisis Promosi Sektor Industri Sumber Daya Alam | 7 | 2,928,000 |
| 48 | Analisis Promosi Sektor Jasa dan Kawasan | 7 | 2,928,000 |
| 49 | Analisis Promosi Sektor Industri Manufaktur | 7 | 2,928,000 |
| 50 | Analisis Promosi Sektor Industri Infrastruktur | 7 | 2,928,000 |
| 51 | Analisis Promosi Sektor Infrastruktur | 7 | 2,928,000 |
| 52 | Pengadministrasi Data Promosi Sektoral | 6 | 2,702,000 |
| 53 | Pengadministrasi Data Promosi | 6 | 2,702,000 |
| 54 | Analisis Bahan Promosi Wilayah | 7 | 2,928,000 |
| 55 | Penyusun Program dan Monitoring | 7 | 2,928,000 |
| 56 | Penyelenggaraan Pameran | 5 | 2,493,000 |
| 57 | Penyusun Bahan Pameran | 7 | 2,928,000 |

| No. | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 58 | Pendistribusi dan Publikasi Pameran | 5 | 2,493,000 |
| 59 | Penyusun Bahan Promosi Elektronika | 7 | 2,928,000 |
| 60 | Pelayan Informasi | 5 | 2,493,000 |
| 61 | Pengadministrasi Sarana Promosi | 6 | 2,702,000 |
| 62 | Analisis Data Kerjasama Wilayah Amerika dan Eropa | 7 | 2,928,000 |
| 63 | Analisis Data Kerjasama Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika | 7 | 2,928,000 |
| 64 | Pengadministrasi Data Kerjasama Bilateral & Multilateral | 6 | 2,702,000 |
| 65 | Analisis Data Kerjasama Organisasi PBB dan Non PBB | 7 | 2,928,000 |
| 66 | Analisis Data Kerjasama Organisasi WTO | 7 | 2,928,000 |
| 67 | Analisis Data Kerjasama Regional | 7 | 2,928,000 |
| 68 | Analisis Data Kerjasama Organisasi ASEAN | 7 | 2,928,000 |
| 69 | Analisis Data Kerjasama Sub Regional | 7 | 2,928,000 |
| 70 | Analisis Data Kerjasama Dalam Negeri | 7 | 2,928,000 |
| 71 | Analisis Data Kerjasama Organisasi APEC | 7 | 2,928,000 |
| 72 | Pengadministrasi Data Kerjasama Regional | 6 | 2,702,000 |
| 73 | Analisis Data Kerjasama Organisasi ASEM | 7 | 2,928,000 |
| 74 | Pengelola Data Penyiapan Kerjasama Luar Negeri | 7 | 2,928,000 |
| 75 | Pengelola Data Evaluasi Kerjasama Luar Negeri | 7 | 2,928,000 |
| 76 | Pengelola Data Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri | 6 | 2,702,000 |
| 77 | Analisis Aplikasi Perubahan | 7 | 2,928,000 |
| 78 | Analisis Aplikasi Baru | 7 | 2,928,000 |
| 79 | Analisis Aplikasi Perluasan | 7 | 2,928,000 |
| 80 | Pengadministrasi Aplikasi | 6 | 2,702,000 |
| 81 | Pengadministrasi Pelayanan Perizinan | 6 | 2,702,000 |
| 82 | Analisis Izin Usaha Tetap dan Angka Pengenal Importir Terbatas Sektoral | 7 | 2,928,000 |
| 83 | Analisis Tenaga Kerja Asing Sektoral | 7 | 2,928,000 |
| 84 | Verifikator Bahan Baku Sektor Primer dan Tersier | 7 | 2,928,000 |
| 85 | Pengadministrasi Fasilitas Penanaman Modal | 6 | 2,702,000 |
| 86 | Verifikator Bahan Baku Sektor Sekunder | 7 | 2,928,000 |
| 87 | Analisis Data Proyek PMA/PMDN | 7 | 2,928,000 |
| 88 | Analisis Data Proyek Untuk Bahan Pembinaan di | 7 | 2,928,000 |

| No. | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Tunjangan Kinerja (Rp) |
|------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Sektor Primer | | |
| 89 | Analisis Data Proyek Untuk Bahan Pembinaan di Sektor Tersier | 7 | 2,928,000 |
| 90 | Analisis Data Proyek Untuk Bahan Pembinaan di Sektor Sekunder | 7 | 2,928,000 |
| 91 | Pengadministrasian dan Pengarsipan Dokumen Audit | 6 | 2,702,000 |
| 92 | Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan | 7 | 2,928,000 |
| 93 | Pengumpul Data dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan | 6 | 2,702,000 |
| 94 | Analisis Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan | 7 | 2,928,000 |
| 95 | Teknisi Aplikasi Komputer | 7 | 2,928,000 |
| 96 | Analisis Data Penanaman Modal | 7 | 2,928,000 |
| 97 | Pengelola Help Desk | 7 | 2,928,000 |
| 98 | Teknisi Jaringan | 7 | 2,928,000 |
| 99 | Pengadministrasian Data dan Informasi | 4 | 2,350,000 |
| 100 | Statistisi | 7 | 2,928,000 |
| 101 | Pengelola Data Center | 7 | 2,928,000 |
| 102 | Analisis Pertimbangan Hukum | 7 | 2,928,000 |
| 103 | Analisis Bantuan Hukum | 7 | 2,928,000 |
| 104 | Pengadministrasian Pertimbangan dan Bantuan Hukum | 6 | 2,702,000 |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI